



Policy Brief

Kajian Kesiapan Digitalisasi Desa Kabupaten Muara Enim



Disusun oleh :
Majelis Pertimbangan Kelitbangan

Ringkasan Eksekutif

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Teknologi digital yang berkembang pesat saat ini memberikan peluang besar bagi desa untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Kajian ini mencoba melihat sejauh mana kondisi kesiapan infrastruktur teknologi di desa, kesiapan sumber daya manusia di desa, termasuk tingkat literasi digital, kesadaran dan pemahaman masyarakat desa tentang manfaat dan cara menggunakan teknologi digital serta kontribusi dalam meningkatkan pengembangan desa melalui pemberdayaan BUMDesa. Desain penelitian ini menggunakan *mix method yaitu melalui* pendekatan kuantitatif dan dilanjutkan dengan kualitatif bertujuan untuk memberikan deskripsi serta mendapatkan gambaran yang jelas terkait kepuasan pelayanan masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Penelitian berfokus pada 8 kecamatan yaitu : Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Rambang, Kecamatan Muara Belida, dan Kecamatan Gelumbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat sudah sangat familiar dengan teknologi digital, namun masih hanya terbatas pada penggunaan media sosial dan berbelanja online. Mengenai ketersediaan jaringan atau akses internet, sebagian masyarakat memiliki akses internet sendiri dan sebagian lainnya memanfaatkan dari akses lain seperti WIFI. Sebagian besar masyarakat mendukung jika diadakan program digitalisasi desa dengan harapan terjadi peningkatan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik, peningkatan kualitas hidup dalam keterkaitan aktifitas ekonomis serta peningkatan akses mendapatkan informasi dan pengetahuan. Penelitian ini memberikan 8 rekomendasi antara lain; Penguatan infrastruktur dan dukungan akses infrastruktur jaringan internet ke desa; Pengembangan Aplikasi Lokal;. Pemeliharaan Keamanan Data: Evaluasi Berkala dan Perbaikan: Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Pemimpin Desa sebagai Teladan: Peningkatan Literasi Teknologi Digital bagi masyarakat desa; Membangun kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki masyarakat desa terhadap jaringan, infrastruktur internet desa yang sudah ada.

Pendahuluan

Desa sebagai salah satu wilayah yang ada di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian nasional. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam mengembangkan desa, salah satunya adalah minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Padahal, pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan banyak manfaat bagi pengembangan desa, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan aturan hukum yang terkait dalam Peraturan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, serta

memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, kajian tentang kesiapan digitalisasi desa menjadi penting untuk dilakukan. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Putra et al., 2017).

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memajukan desa, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi, antara lain rendahnya akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di desa. Teknologi digital yang berkembang pesat saat ini memberikan peluang besar bagi desa untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah memberikan kewenangan kepada desa secara otonom untuk meletakkan pondasi pembangunan yang diawali dari tingkat desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi dari satu kesatuan sistem pembangunan nasional, yang dikaitkan dengan data pemerintah daerah dan menjadi pedoman dalam membangun pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah harus dibangun di atas data dan informasi yang akurat dan handal untuk mengatasi masalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan. Dengan digunakannya sistem informasi pemerintah daerah maka akan memudahkan transparansi informasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, para instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, kementerian dan lembaga akan lebih mudah dalam menarik data pembangunan secara cepat dan juga akurat. Digitalisasi desa ini mencakup semua aspek anggaran pemerintah daerah, mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai penatausahaan. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi mandat untuk menetapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mana apabila tidak diterapkan akan berpengaruh pada penilaian kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sekaligus menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Digitalisasi desa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Upaya mendukung pengembangan *e-government*, telah jelas dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan

layanan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk menghasilkan layanan yang mudah dan cepat.

Digitalisasi desa adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. Kesiapan digitalisasi desa menjadi penting karena akan berdampak langsung pada kemampuan desa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan masyarakat.

Faktor yang dapat menjadi penentu kesiapan digitalisasi desa meliputi, Infrastruktur desa yang memiliki akses internet yang baik dan infrastruktur teknologi yang memadai akan lebih mudah dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dalam kesiapan digitalisasi desa dalam hal ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital juga akan mempermudah dalam penggunaan teknologi mengimplementasikan teknologi digital untuk kepentingan masyarakat.

Faktor kesadaran masyarakat terhadap digitalisasi desa bermanfaat bagi kemajuan teknologi dan pentingnya teknologi digital akan lebih mudah dalam menerima dan mengadopsi teknologi digital untuk kepentingan masyarakat, dan ketersediaan dana juga menjadi faktor penting dalam kesiapan digitalisasi desa. Desa yang memiliki sumber daya keuangan yang memadai akan lebih mudah dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital untuk kepentingan masyarakat.

Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed method approach* dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses pengumpulan dan analisis data numerik. Hal ini dapat digunakan untuk menemukan pola dan rata-rata, membuat prediksi, menguji hubungan sebab akibat, dan menggeneralisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Sumber data meliputi data survei dan data sekunder. Teknik analisis meliputi tabulasi data frekuensi. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berlandaskan filsafat *post positivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi serta mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan Keterkaitan Kesiapan

digitalisasi desa yang ada di Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini berfokus pada pihak yang terkait operasional Dinas Pemerintah dan masyarakat selaku penerima layanan yang ada di Kabupaten Muara Enim khususnya 8 kecamatan yaitu Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Rambang, Kecamatan Muara Belida, dan Kecamatan Gelumbang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa infrastruktur teknologi di desa, termasuk akses internet, kecepatan jaringan serta ketersediaan perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung digitalisasi di desa masih terbatas.
2. Bahwa Sumber Daya Manusia di desa, termasuk tingkat literasi digital, keterampilan teknologi informasi, serta kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sehari-hari masih terbatas/ belum siap.
3. Bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat desa tentang manfaat dan cara menggunakan teknologi digital secara umum sudah cukup baik.
4. Bahwa Digitalisasi Desa dapat menggerakkan usaha BUMDesa untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan desa

SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat diberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

SARAN

1. Rencana Strategis Digitalisasi: Pemerintah desa perlu merancang rencana strategis digitalisasi yang berfokus pada tujuan jangka pendek dan panjang. Rencana ini harus mencakup tahapan implementasi, alokasi anggaran, dan indikator keberhasilan yang jelas.
2. Perlu adanya investasi yang berkelanjutan dalam peningkatan Infrastruktur Teknologi yang memadai terkait dengan akses internet yang stabil dan perangkat digital yang mudah dipahami masyarakat . Ini akan memastikan semua warga dapat mengakses layanan dan informasi digital dengan mudah.

3. Pelatihan Literasi Digital: Dapat diselenggarakan program pelatihan literasi digital secara berkala untuk meningkatkan keterampilan teknologi warga. Ini penting agar semua anggota masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan efektif.
4. Pemberdayaan Perempuan dalam Digitalisasi: Memastikan program pelatihan dan pemberdayaan digital juga mencakup perempuan di desa. Dukungan partisipasi aktif perempuan dalam inisiatif digitalisasi.
5. Kampanye Partisipasi Masyarakat: Melakukan kampanye yang mengedukasi dan memotivasi warga untuk terlibat dalam inisiatif digitalisasi. Memberikan contoh konkret tentang bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan layanan dan partisipasi masyarakat.

REKOMENDASI

1. Penguatan infrastruktur dan dukungan akses infrastruktur jaringan internet ke desa
2. Pengembangan Aplikasi Lokal: Mengembangkan aplikasi lokal yang sesuai dengan kebutuhan ciri khas desa. Aplikasi ini dapat mencakup informasi penting, pelaporan masalah, dan saluran komunikasi langsung antara pemerintah desa dan warga.
3. Pemeliharaan Keamanan Data: Memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dan digunakan dalam proses digitalisasi dijaga dengan baik. Menetapkan kebijakan keamanan data yang ketat untuk melindungi privasi warga.
4. Evaluasi Berkala dan Perbaikan: Melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi digitalisasi. Menggunakan hasil evaluasi ini untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam rencana dan taktik implementasi khususnya di beberapa desa yang sudah terbangun sistem informasi digital.
5. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Menjalin kolaborasi dengan lembaga pendidikan, lembaga riset, dan perusahaan teknologi untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pengetahuan dan sumber daya.
6. Pemimpin Desa sebagai Teladan: Memastikan pemimpin desa terlibat secara aktif dalam penggunaan teknologi dan memberikan teladan positif kepada masyarakat.
7. Peningkatan Literasi Teknologi Digital bagi masyarakat desa. Bahwa pemahaman masyarakat desa tentang manfaat dan cara menggunakan teknologi digital secara umum sudah cukup baik. Namun masih banyak terbatas pada penggunaan media social saja sehingga dibutuhkan pengguna dari konsumtif menjadi produktif. Bahwa Digitalisasi Desa dapat menggerakkan usaha BUMDesa untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan desa.

8. Membangun kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki masyarakat desa terhadap jaringan, infrastruktur internet desa yang sudah ada. Serta memberikan kemudahan dan bersifat kooperatif terhadap pembangunan infrastruktur dan jaringan internet desa.

REFERENSI

- Putra et al., (2017) Putra, S. J., Sis, M., Aang Subiyakto, S., Kom, M., et al. (2017).Pengujian kepuasan sistem informasi menggunakan end-user computingsatisfaction studi kasus: Sistem Informasi Akademik UIN Syarif HidayatullahJakarta. B.S. thesis.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Dasar Hukum :
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan mandat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di wilayah melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- PERPRES Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rekomendasi Detil

NO	MODEL	PROGRAM LANJUTAN/ KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME	OPD PELAKSANA& PIHAK LAINNYA	SUMBER DANA
			INDIKATOR	CAPAIAN			
1	Penguatan infrastruktur dan dukungan akses infrastruktur Jaringan Internet ke Desa	- Melaksanakan MoU dan MoA bersama Penyedia Jasa Internet dengan Pemkab/ DISKOMINFO - Dukungan Pengadaan Infrastruktur Jaringan	- Adanya MoA antara Penyedia Jasa Internet dan Diskominfo - Adanya MoA antara Penyedia Jasa Internet dan PMDes - Adanya MoA antara Diskominfo dan PMDes - Adanya MoA antara Diskominfo dengan BUMDESA - Ketersediaan infrastruktur digitalisasi desa - Ketersediaan jaringan internet seperti akses internet yang memadai dan	Jumlah program kegiatan yang dilakukan	- Tersedianya akses digitalisasi desa - Tersedianya akses internet desa - Tersedianya pengelolaan internet desa oleh BUMDESA - Peningkatan pendapatan BUMDESA - Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap berita, informasi kesehatan, dan sumber daya pendidikan - Meningkatnya kualitas sumber	Diskominfo, PemDes, Kerjasama Pihak Ketiga (PLN yang memiliki IconNet)	APBN/AP BD/CSR/B UMDESA/ DLL

		Survei kesiapan infrastruktur teknologi digitalisasi di desa	dukungan teknis. • Digitalisasi BUMDESA • Tersedianya infrastruktur digitalisasi dan jaringan internet desa		daya manusia masyarakat desa • Semakin baik tingkat literasi masyarakat desa terhadap teknologi informasi secara positif • Meningkatkan peluang usaha dan pertumbuhan ekonomi di desa Jaringan internet dan digitalisasi desa berjalan lancar		
		Survei kesiapan SDM di desa	• Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sehari-hari		Memberikan gambaran dan pemahaman, keterampilan teknologi, dan minat partisipasi dalam inisiatif digitalisasi.		
2.	Pengembangan Aplikasi Lokal	a. Survei kebutuhan pengguna	• Data by name by address potensi desa • Data terintegrasi	Jumlah program kegiatan yang dilakukan	Database terintegrasi dan dapat upgrading data setiap waktu	Diskominfo, PemDes,	APBN/APBD/ADD/CSR/BUMDESA/DLL

		b. Pembuatan aplikasi desa berbasis web dan lokal	• Tersedianya web aplikasi desa • Terintegrasinya data secara langsung		• Akses data lebih cepat • Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien	Diskominfo, PemDes, Kerjasama Pihak Ketiga	
		c. Pelatihan penggunaan aplikasi bagi pengelola web	• Peningkatan pemahaman operator desa • Pengurangan durasi waktu pelayanan • Jumlah layanan meningkat		Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pekerjaan	Diskominfo, PemDes	
3.	Pemeliharaan Keamanan Data	Membangun server terpusat di setiap kecamatan dan terintegrasi di kabupaten (Diskominfo) Dukungan anggaran untuk perbaikan	• Tersedianya infrastruktur • Tersedianya server aplikasi desa • Tersedianya anggaran pemeliharaan keamanan data	Jumlah program kegiatan yang dilakukan	• Pengarsipan data lebih efektif dan efisien • Big data terjaga dan tersimpan dengan baik Kegiatan pemeliharaan Keamanan Data terjaga	Diskominfo, PemDes, Kerjasama Pihak Ketiga	APBN/APBD/ADD/CSR/BUMDES/DLL

4.	Evaluasi Berkala dan Perbaikan	Program/ Kegiatan Monev Berkelanjutan dari Gabungan Tim (Diskominfo dan Operator Desa)	• Peningkatan kualitas kecepatan akses website lokal • Jadwal Pemeliharaan dan kerusakan gangguan IT secara reguler • Berkurangnya tingkat kerusakan, hambatan dan gangguan sistem web	Jumlah program kegiatan yang dilakukan	• Efisiensi biaya pemeliharaan web • Efektifitas pekerjaan tidak terganggu • Pelayanan tidak terganggu dan berkelanjutan	Diskominfo, PemDes, Kerjasama Pihak Ketiga	APBN/APBD/ ADD/CSR/B UMDES/DLL
5.	Kolaborasi dengan Pihak Eksternal	MoU dengan UMKM desa, BUMDesa, dan Pihak eksternal lainnya seperti Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri	• Terbentuknya program pendukung promosi UMKM lokal, domestik, dan regional • Jumlah UMKM lokal meningkat • Peningkatan kapasitas dan kualitas BUMDesa	• Dalam 1 tahun, meningkatnya UMKM secara kuantitas dan kualitas • Dalam 2 tahun, Kemandirian BUMDesa	• Peningkatan PADes • Perluasan sektor usaha BUMDesa di bidang wisata, kuliner, dll • Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa	Diskominfo, PemDes, BUMDesa, UMKM Lokal, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Kerjasama Pihak Ketiga	APBN/APBD/ ADD/CSR/B UMDesa/DLL
6.	Pemimpin Desa sebagai Teladan	Lomba Inovasi Digitalisasi Desa Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional	• Pemahaman Teknologi serta kepekaan terhadap kebutuhan desa • Pemahaman mendalam tentang	Ketercapaian Prestasi lomba Inovasi Desa dan kepala desa Tingkat Provinsi dan Nasional	• Meningkatkan promosi desa level domestik dan regional • Peningkatan inovasi dan	Diskominfo, PMDes, BALITBANGDA	APBN/APBD/ ADD/CSR/B UMDesa/DLL

		Lomba Inovasi Digitalisasi Desa Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional	teknologi dan potensinya dalam memajukan desa • Mampu mengidentifikasi peluang digitalisasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.		dukungan IGA Award • Peningkatan transparansi dan tata kelola pemerintahan desa		
7.	Peningkatan Literasi Teknologi Digital bagi masyarakat desa. Bahwa pemahaman masyarakat desa tentang manfaat dan cara menggunakan teknologi digital secara umum sudah cukup baik. Namun masih banyak terbatas pada penggunaan media social saja sehingga dibutuhkan pengguna dari konsumentif	Program Pengenalan melek teknologi informasi bagi siswa sekolah Program Digitalisasi UMKM	• Pelatihan dan workshop teknologi digital bagi anak sekolah di desa • Aksesibilitas digital dan internet bagi semua lapisan masyarakat secara positif • Jumlah UMKM desa yang mengadopsi platform digital untuk pemasaran dan penjualan • Evaluasi pertumbuhan	Jumlah program kegiatan yang dilakukan	• Masyarakat memahami pemanfaatan teknologi informasi secara positif • Masyarakat dapat mengembangkan dan memperkenalkan potensi desa yang ada • Efektivitas dan Efisiensi pengembangan UMKM desa lebih cepat.	Diskominfo, PMDes, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Koperasi dan UKM	APBN/APBD/ADD/CSR/BUMDES/DLL

	menjadi produktif. Bahwa Digitalisasi Desa dapat menggerakkan usaha BUMDesa untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan desa.	Dukungan Tenaga IT Desa	produktivitas dan pendapatan UMKM desa setelah menerapkan program digitalisasi • Tersedianya 1 orang SDM IT Desa		Pengelolaan digitalisasi desa berjalan baik dan lancar		
--	--	--------------------------------	---	--	---	--	--

8.	Membangun kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki masyarakat desa terhadap jaringan, infrastruktur internet desa yang sudah ada. Memberikan kemudahan dan bersifat kooperatif terhadap pembangunan infrastruktur dan jaringan internet desa.	• Survei untuk menilai tingkat kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki masyarakat desa terhadap jaringan, infrastruktur internet desa yang sudah ada. • Program pembentukan character building masyarakat desa • Pendampingan BUMDesa	• Tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga infrastruktur jaringan semakin baik • Peningkatan partisipasi BUMDesa dalam digitalisasi desa • Menggerakan BUMDesa melalui digitalisasi desa untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas masyarakat desa	Dalam setiap tahun, kerusakan jaringan internet akibat non teknis menurun	• Mendorong kemajuan UMKM Lokal • Mendorong pengembangan kapasitas BUMDesa • Memudahkan masyarakat untuk saling koordinasi akses internet desa	Diskominfo, PMDes, Dinas Pendidikan Nasional,	APBN/APBD/ADD/CSR/ BUMDesa
----	--	---	--	--	--	--	-----------------------------------

